

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah model pemerintahan yang mensyaratkan adanya suksesi kepemimpinan. Hal ini tidak lain karena pada dasarnya demokrasi menghendaki terciptanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam mekanisme suksesi kepemimpinan yang dikenal dengan pemilihan umum. Pemilihan umum atau yang sering disebut dengan istilah pemilu merupakan proses-proses politik guna menentukan orang yang akan menduduki jabatan politis dalam bermacam-macam kedudukan pemerintahan baik dari lingkup nasional ataupun daerah ataupun lingkup eksekutif (pilpres, pilkada, pilkades) ataupun legislatif (DPR, DPD, ataupun DPRD) (Syafiie & Azhari, 2002). Praktik pemilu di lingkungan terdekat dapat dijumpai dalam proses pengisian kedudukan-kedudukan jabatan politis seperti ketua OSIS di tingkat pelajar ataupun komisanis di kalangan mahasiswa, walaupun sebenarnya dalam tataran tersebut istilah pemilihan lebih *familiar* digunakan ketimbang pemilu.

Seringkali pemilu disebut sebagai momentum pesta demokrasi, hal ini karena pemilu hanya dapat dilaksanakan secara periodik. Sistem pemilu di Indonesia sendiri dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1955 silam, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September dan Konstituante pada 15 Desember 1955, begitupun yang dilakukan pada masa orde baru, pemilihan umum dilakukan untuk memilih badan legislatif, sementara presiden dipilih oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat atau MPR hingga tahun 1996. Pasca tumbangnya Soeharto tahun 1998, terjadi gelombang besar demokratisasi di Indonesia yang bermuara pada amandemen UUD 1945 dan menyebabkan terciptanya mekanisme pemilihan umum menyeluruh pada tahun 2004 dimana pemilu tidak diperuntukkan hanya untuk memilih badan legislatif namun juga untuk memilih presiden.

Dewasa ini, baru saja kita saksikan bersama momentum pesta demokrasi di Indonesia pada pemilu tahun 2019 silam. Momen kali ini begitu istimewa, terlebih Pemilu 2019 ini dilaksanakan serentak untuk memilih posisi politis yang sangat bergengsi dan vital, yakni: pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) untuk memilih anggota DPR dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun demikian, harus diakui bahwa Pemilu 2019 sarat akan polemik dan drama. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Mulanya Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden nomor urut 01 dikabarkan akan menggaet Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai calon wakil presiden. Namun politik *last minute* terjadi, menjelang akhir deklarasi penetapan bakal calon presiden dan wakil presiden, akhirnya diputuskan Joko Widodo maju bersama KH. Ma'ruf Amin. Tentu hal ini sempat mengejutkan khalayak luas, mengingat sosok KH. Ma'ruf Amin yang tidak terprediksi dalam bursa calon sebelumnya. Beliau adalah ulama/kiai NU yang saat itu sedang menjabat sebagai ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia)

sekaligus merangkap sebagai *Rais Aam* PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia.

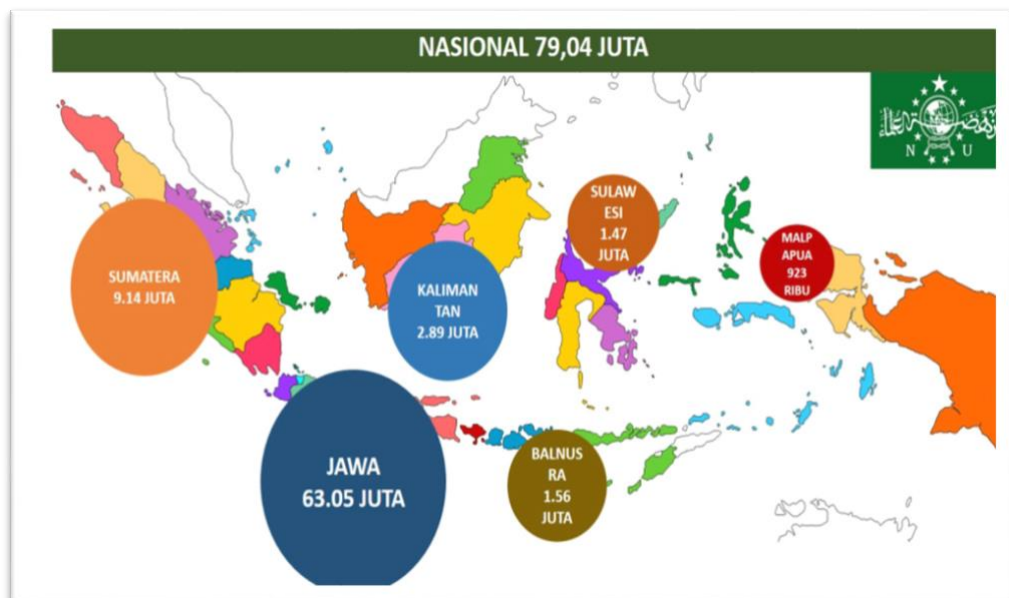
Menyoal pembahasan mengenai Nahdlatul Ulama tidak dapat dilepaskan dari dua lingkup aspek yang inheren yakni aspek sosio-kulutural dan politik. Nahdlatul Ulama didirikan oleh oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah pada tanggal 16 Rajab 1344/31 Januari 1926. Eksistensi Nahdlatul Ulama dapat dilihat sebagai bentuk upaya perjuangan politik para ulama tradisionalis agar masih tetap meneguhkan eksistensi sikap politis mereka dalam menjalankan urusan agama, ditengah banyaknya gerakan reformis agama (Anam, 1999).

Sejarah Nahdlatul Ulama yang berbicara soal *khittah* Nahdlatul Ulama, seluruhnya merujuk pada tahun 1926 yang juga dikenal sebagai tahun kelahiran Nahdlatul Ulama. Pada masa itu, *khittah* Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang berpondasi menjadi penggerak sosio-agama. Namun dalam perjuangannya telah mengalami cukup banyak perubahan, terutama ketika Nahdlatul Ulama mulai bergerak dalam arena politik praktis. Secara resmi Nahdlatul Ulama berdiri sebagai partai politik pada tahun 1952 guna mengarungi pemilu pertama Indonesia di tahun 1955. Hasil pemilu pertama Indonesia tersebut menempatkan NU berdiri pada posisi ke 3 (tiga) di bawah PNI dan Masyumi serta di atas PKI. Seiring berlangsungnya dinamika politik nasional, terutama pasca berkuasanya Soeharto, keberadaan partai politik mulai dirampingkan. Melalui kebijakan fusi partai tahun 1973, Nahdlatul Ulama menggabungkan diri bersama Partai Persatuan Pembangunan.

Nahdlatul Ulama kerap kali menjadi sorotan publik dan berbagai kelompok-kelompok kepentingan ketika menjelang masa pemilihan umum, baik di tingkat daerah ataupun nasional, baik pemilu eksekutif ataupun legislatif. Hal ini tidak lain dikarenakan NU yang memiliki basis *massa* yang sangat besar terutama warga *nahdliyin* (pengikut Nahdlatul Ulama) yang berada di daerah Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebuah temuan Alvara Research Center pada tahun 2016 yang berjudul “Potret Keberagaman Muslim Indonesia”, membeberkan bahwa karakteristik Nahdlatul Ulama sangat “*java-centric*”, dari 79,04 juta jiwa yang mengaku berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama tersebut 79,8% nya adalah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa.

Gambar 1.1

Persebaran Nahdliyin di Indonesia



Sumber: Survei “Potret Keberagaman Muslim Indonesia”. Alvara Research Center 2016

Berdasarkan data persebaran *nahdliyin* di Indonesia, NU memiliki dua basis terbesar yang terletak di Pulau Jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini dapat dipahami karena banyaknya tokoh-tokoh *kondang* NU disana. Jawa Timur

misalnya, banyak ulama Nahdlatul Ulama sekaligus tokoh bangsa yang lahir disana seperti KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU), KH. Wachab Hasbullah (pendiri NU), KH. Abdurrahman Wahid (presiden RI ke-4), KH. Miftachul Akhyar (*Rais Aam* PBNU 2018-2020 dan ketua MUI 2020-2025), dan tokoh *masyhur* lainnya. Serupa dengan Jawa Tengah yang juga melahirkan tokoh pendiri NU seperti KH. Ma'shoem Ahmad, KH. Baidlowi Abdul Aziz, dan KH. Kholil Masyhuri dan ulama *kondang* NU lainnya yang masih kita kenal hingga hari ini seperti Habib Luthfi bin Yahya (Pekalongan), Habib Umar Muthohar (Semarang), KH. Maimoen Zubair atau Mbah Moen (Rembang), KH. Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus (Rembang), dan KH. Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha (Rembang).

Sebagian besar tokoh-tokoh yang disebut di muka berasal dari Kabupaten Rembang. Terkhusus tiga tokoh pendiri NU tersebut yang seluruhnya berasal dari tanah Lasem (Afif, 2020). Hal inilah yang menjadikan Lasem sebagai wilayah cabang NU yang istimewa. PCNU Lasem merupakan satu-satunya cabang NU di Jawa Tengah yang kedudukannya setara dengan cabang wilayah kabupaten/kota meskipun statusnya adalah kecamatan. Hal itu juga tidak terlepas dari persebaran pondok pesantren di Lasem yang sangat banyak. Tercatat berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang (2018), jumlah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Rembang adalah sebanyak 107 pondok pesantren. *Episentrum* pondok pesantren ini berada di Kecamatan Sarang dan Kecamatan Lasem dengan jumlah masing-masing pondok pesantren

adalah 35 dan 21 pondok pesantren. Melihat realitas tersebut, maka tak heran bila khalayak menyematkan gelar kota santri kepada Kecamatan Lasem.

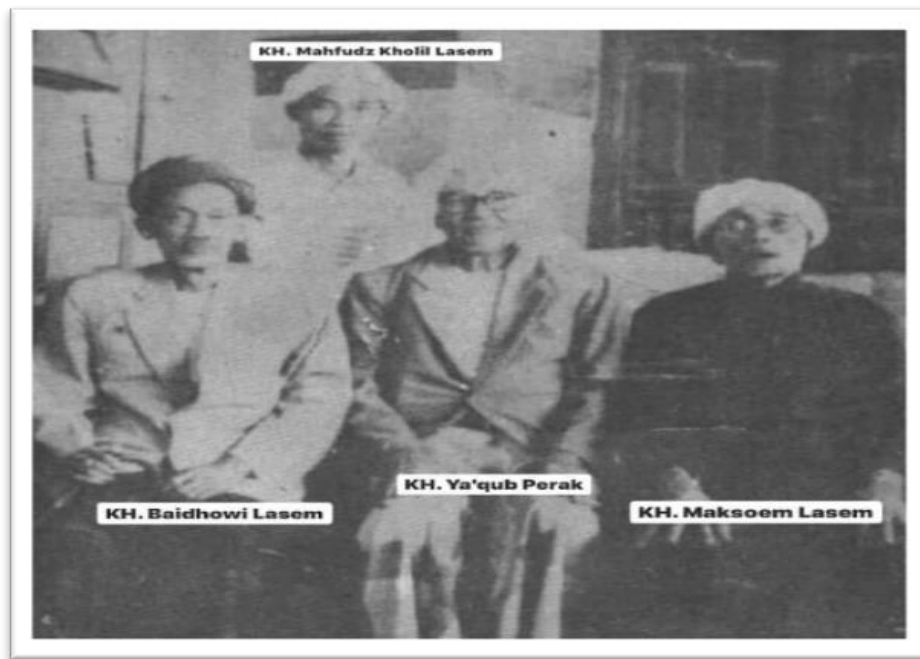
Banyaknya jumlah pondok pesantren tentunya diprakarsai oleh sosok tokoh ulama/kiai kharismatik NU di dalamnya. Misalnya kiai kharismatik yang juga seorang sastrawan terkemuka Indonesia yaitu KH. Ahmad Mustofa Bisri atau sering kita kenal dengan sebutan Gus Mus. Gus Mus memiliki sebuah pondok pesantren yang diberi nama Pondok Raudlatul Thalibin. Kemudian ulama besar yang sangat dikenal masyarakat Indonesia yakni, KH. Maimoen Zubair (Mbah Moen) pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar. Selain dua kiai besar di atas, ada juga kiai NU dari Rembang yang fenomenal akhir-akhir ini di media sosial yakni KH. Bahauddin Nur Salim (Gus Baha), sosok kiai berlatar belakang NU pengasuh pondok pesantren Al-Quran Narukan Kragan Rembang.

Menurut Jati (dalam Jurnal Ulul Albab, 13, 2012), kehadiran pondok pesantren adalah gambaran kultural yang dimiliki Nahdlatul Ulama. Dalam artian pondok pesantren memiliki implikasi kultural bagi kehidupan masyarakat sekitar. Maka tidak heran jika banyak masyarakat Kabupaten Rembang juga mengikuti arus budaya yang berkembang disana, yaitu dengan bergabung ke dalam organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Warga *nahdliyin* di Kabupaten Rembang tergolong warga yang masih memiliki tradisi tolong menolong atau gotong royong yang masih mengakar kuat. *Nahdliyin* memegang teguh nilai-nilai ajaran NU yakni patuh terhadap apapun yang diperintahkan/diajarkan oleh kiai yang dianutnya, hal ini juga selaras dari makna nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni: *ndherek kiai*.

Berbicara mengenai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Rembang, maka muaranya akan kembali kepada Nahdlatul Ulama yang berada di Lasem (Afif, 2020). Lagi-lagi hal ini tidak dapat dilepaskan karena kontribusi Lasem sebagai wilayah yang telah melahirkan tiga tokoh ulama/kiai pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia yakni KH. Ma'shoem Ahmad, KH. Baidlowi Abdul Aziz dan KH. Kholil Masyhuri.

Gambar 1.2

Foto Tiga Kiai Pendiri NU yang Berasal dari Tanah Lasem



Sumber: Arsip Foto A'anun Ni'am, Ketua PC IPNU Lasem 2018-2021

Barang tentu sudah tidak heran bila melihat betapa kuatnya pengaruh nilai-nilai NU dalam kehidupan masyarakat Lasem. Lebih banyak masyarakat sekitar yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama ketimbang dengan organisasi keagamaan lain seperti Muhammadiyah, LDII, dan lain-lain. Fakta tersebut divalidasi data persebaran MWCNU dan ranting PCNU Lasem serta persebaran

pondok pesantren dan santri yang berada di wilayah naungan PCNU Lasem (Afif, 2020).

Tabel 1.1
Persebaran Majelis Wakil Cabang dan Ranting PCNU Lasem

No	Majelis Wakil Cabang (MWC)	Ranting
1.	MWC Pancur	26
2.	MWC Lasem	23
3.	MWC Sluke	17
4.	MWC Kragan	29
5.	MWC Sarang	23
Total		118 Ranting

Sumber: Arsip PCNU Lasem (2020)

Tabel 1.2
Persebaran Santri di Wilayah PCNU Lasem

No	Kecamatan	Pondok Pesantren	Santri
1.	Pancur	3	200
2.	Lasem	21	3.017
3.	Sluke	8	214
4.	Kragan	4	603
5.	Sarang	11	20.000
Total		47 Pondok Pesantren	24.034 Santri

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang (2018)

Melihat data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Majelis Wakil Cabang (MWC) dan ranting yang ada di tubuh PCNU Lasem yaitu sejumlah 5 MWCNU dan 118 ranting. Perlu diketahui bahwa Majelis Wakil Cabang atau MWC adalah struktur NU setingkat kecamatan dan ranting adalah setingkat desa. Bila dikomparasikan dengan ormas lain seperti Muhammadiyah, LDII, dan lain sebagainya, PCNU Lasem relatif unggul dari segi jumlah wakil cabang dan ranting. Di tubuh PCNU Lasem sendiri, terdapat satu desa yang memiliki dua bahkan lebih anak ranting. Padahal biasanya, dalam sebuah desa biasanya diisi oleh satu ranting saja. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kader yang ada di wilayah tersebut. Melihat aspek historis dan kultural Lasem, tidak dapat dipungkiri bila Lasem menjadi bagian penting dan paling tua dari sejarah ke-NU-an di Indonesia.

Nahdlatul Ulama Lasem masa itu mendapatkan tanggapan positif oleh para santri, serta warga secara umum. Terlebih pasca kemerdekaan, keberadaan golongan Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat *massif* untuk menyebar paham komunisme dan menyulut gerakan perlawanan terhadap ideologi bangsa Indonesia tahun 1948. Kemudian tiga tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Lasem mencanangkan penanaman kebudayaan, amaliah, serta ideologi bangsa terhadap beberapa golongan warga seperti santri dan warga pada umumnya. Berbagai jenis perlawanan dilakukan oleh beberapa tokoh Nahdlatul Ulama Lasem beserta santri terhadap PKI, mulai dari menanamkan kebudayaan, amaliah, hingga ikut terjun langsung di medan perang. Nilai semangat serta moralitas yang sudah dicontohkan dari tiga tokoh Nahdlatul Ulama itulah, yang kemudian menjadi

arah dalam melakukan dakwah serta perjuangan Nahdlatul Ulama Lasem di masa mendatang (Fatawi, 2020).

Berkenaan dengan kontestasi Pilpres 2019 di wilayah Lasem disambut positif oleh para kiai, santri, dan masyarakat luas. Walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pendapat diantara mereka juga sering terjadi. Perbedaan pendapat ini diartikan sebagai perbedaan pandangan politik (Hamid, 2020). Sama halnya dengan yang terjadi pada internal PCNU Lasem. Setiap kiai/pengasuh pondok pesantren sebagai representasi dari pondok pesantren memiliki pandangan politiknya sendiri-sendiri. Hal ini yang kemudian memengaruhi pilihan politik santri yang hidup di lingkungan pondok pesantren tersebut (Hamid, 2020).

Menurut Hamid selaku Ketua NU Care - Lazisnu Lasem, cucu para pendiri Nahdlatul Ulama yang ada Lasem memiliki pandangan politik yang berbeda dalam menyikapi pilpres tahun 2019. Misalnya KH. Abdul Qoyyum Mansur (cucu dari KH. Kholil Masyhuri) yang menyatakan tidak memihak kepada calon kontestan pilpres siapapun. Sementara KH. Ahfas Baidlowi (cucu dari KH. Baidlowi Abdul Aziz) yang mendukung salah satu kontestan pilpres tahun 2019. Padahal secara historis, seharusnya para tokoh tersebut mendukung kontestan yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, mengingat kakek dari tokoh-tokoh tersebut merupakan pendiri Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia saat ini.

Ditinjau dari realita sosio-kultural di wilayah-wilayah pondok pesantren Nahdlatul Ulama Lasem, para santri memiliki satu pemahaman yang mengakar yaitu *sendhika dhawuh*. Istilah ini dimaksudkan bahwa apapun yang dikatakan

atau diajarkan oleh kiai maka santri akan mengikuti. Pemahaman tersebut sampai saat ini masih tetap ada dan menganggap bahwa hal ini tidak menyimpang, justru dianggap sebagai wujud *welas asih* dan penghormatan kepada terhadap kiaiinya (Fatawi, 2020).

Diskursus mengenai perbedaan pandangan politik Pilpres 2019 oleh para kiai di lingkup PCNU Lasem terkhusus di daerah Lasem sendiri (MWCNU Lasem), serta dikorelasikan dengan perilaku memilih para santri inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul “Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Santri di Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana partisipasi politik para santri yang berada di wilayah MWCNU Lasem dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019?

1.2.2 Bagaimana perilaku memilih para santri yang berada di wilayah MWCNU Lasem dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019?

1.3 Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa terkait partisipasi politik para santri Nahdlatul Ulama Lasem.

1.3.2 Untuk mengukur perilaku memilih santri yang berada di wilayah Nahdlatul Ulama Lasem dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

1.3.3 Untuk mengetahui perilaku memilih berdasarkan pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional (*rational choice*).

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan positif untuk kepentingan negara (pada umumnya), disamping itu dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat terkait tentang bagaimana partisipasi politik dan perilaku memilih santri yang berada di wilayah MWCNU Lasem dalam menyikapi kontestasi pilpres tahun 2019. Selain itu, diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada sebelumnya, serta dapat menjadi tambahan referensi dan wawasan terhadap penelitian sejenis lainnya.

1.4.2 Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi penulis (pada khususnya) dan bagi para pembaca (pada umumnya). Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro serta diharapkan mampu memberikan kritik dan saran kepada para kontestan, tim sukses, serta kelompok-kelompok kepentingan pada kontestasi pilpres tahun 2019.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi rujukan data sekunder sekaligus menjadi sarana komparasi dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian keberadaan penelitian terdahulu akan menambah khasanah informasi dan referensi dalam menyusun penelitian. Terdapat beberapa penelitian sejenis sebelumnya yang penulis temukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Ahmad Robi Ulzikri (2019) meneliti tentang Nahdlatul Ulama dan Pilpres tahun 2019. Penelitiannya dengan judul “Politik Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini mencoba melacak jenis kebudayaan politik, kontribusi politik, perilaku politik, serta penyebab perilaku politik masyarakat Nahdlatul Ulama Bandar Lampung ketika KH. Ma’ruf Amin diajukan menjadi calon wakil presiden di pilpres tahun 2019.

Ahmad Sanusi dan Galih Gumilar (2019) melakukan penelitian dengan judul “Peran Ma’ruf Amin dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim pada Pemilihan Presiden 2019”. Penelitian ini melihat pengaruh latar belakang Ma’ruf Amin sebagai *Rais Aam* PBNU dikancah pilpres tahun 2019 terhadap para *voters* dalam menentukan pilihannya. Hasil menunjukkan bahwa jabatan strategis yang diemban oleh beliau di tubuh PBNU tentu menjadi daya tarik tinggi bagi para masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Sri Ferdianti (2019) riset mengenai Analisis Perilaku Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi pada pemilu tahun 2019 adalah pemilih rasional. Masyarakat memilih karena program kerja yang

ditawarkan oleh pasangan calon yang mereka pilih, serta bukti nyata kinerja pasangan calon tersebut. Pemilih tradisional, masyarakat memilih karena kedekatan emosional, dan kepribadian pasangan calon yang mereka lihat sangat dekat dengan rakyat.

Ikhwan Arif (2014) tentang Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kandidat dan kepekaan terhadap isu yang berkembang memiliki hubungan terhadap perilaku pemilih pemula pada Pilpres 2014 di Kabupaten Tanah Datar. Orientasi kandidat memiliki keeratan hubungan positif sedang dan kepekaan terhadap isu yang berkembang memiliki hubungan positif sedang, sedangkan identifikasi kepartaian tidak memiliki hubungan terhadap perilaku memilih pemilih pemula pada Pilpres 2014.

Hasil penelitian Mila Amalia (2019) tentang Perilaku Memilih Santri di Kabupaten Demak dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik santri di Kabupaten Demak masih rendah, hal itu dilihat dari pelaksanaan Pilgub Jateng 2018. Sementara perilaku pemilih santri di Kabupaten Demak sebagian besar tergolong pemilih yang rasional karena mendasarkan pilihannya atas penilaian/pertimbangan tertentu (47,5%), seperti visi-misi dan program cagub-cawagub, kinerja cagub-cawagub, rekam jejak cagub-cawagub.

Bila membandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan yang ditemukan. Kesamaan yang didapati adalah

mengenai kesadaran dan partisipasi politik, perilaku memilih, pemilihan umum, serta adanya Nahdlatul Ulama dalam pembahasan penelitian tersebut. Sedangkan hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah objek dan lokasi penelitian. Penulis memilih santri dikarenakan santri memiliki semangat yang tinggi serta mobilisasi pergerakan yang luas. Selain itu, mayoritas santri sudah memiliki hak pilih. Apalagi di lingkup lokasi penelitian ini, istilah *sendhika dhawuh* atau patuh terhadap kiai masih dipegang erat menjadi budaya yang mengakar. Tidak heran jika santri juga menjadi basis utama pendulang suara untuk para kontestan pilpres tahun 2019.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Pemilihan Umum

Pemilu merupakan keadaan dimana konstituen atau *voters* menentukan sebuah pilihan politiknya terhadap mereka yang akan menduduki suatu jabatan politik tertentu. Posisi atau kedudukan-kedudukan ini beragam jenisnya seperti presiden, perwakilan rakyat dengan berbagai macam tingkatan pemerintahan (Syafiie & Azhari, 2002). Menurut Anwar Arifin (2006), istilah pemilu dikenal di Indonesia dan diartikan sebagai bagian upaya dalam memberikan pengaruh pada masyarakat dengan cara persuasi (tanpa paksaan) melalui aktivitas retorik, ikatan politik, interaksi dengan publik, *lobbying* serta berbagai aktivitas lainnya. Walaupun adanya propaganda dan agitasi pada negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia mendapatkan kecaman, akan tetapi pada masa kampanye pemilu, perilaku tersebut banyak dipakai oleh para kontestan (politikus) selaku komunikator politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan fasilitas masyarakat yang berdaulat dalam melakukan pemilihan perangkat DPR, DPD, DPRD, dan presiden beserta wakilnya. Dalam pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan asas luber jurdil “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil” dan didasarkan pada Pancasila serta UUD RI tahun 1945. Penelitian ini secara lebih rinci akan mengangkat pembahasan mengenai pemilu pilpres yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. UU tersebut menerangkan bahwa pemilu yang dimaksud memiliki tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden RI.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang kemudian disingkat pemilu pilpres dirasa sangatlah penting. Pada suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi presidensial, kedudukan seorang presiden merupakan hal yang vital, karena tidak hanya menjadi seorang kepala dalam sebuah negara, tetapi juga merangkap sebagai kepala sebuah pemerintahan. Dengan demikian tidak sedikit pengaruh dari peran presiden dalam memimpin sebuah negara. Gagalnya seorang presiden dalam menjalankan kedudukannya dapat menyebabkan sistem berdemokrasi turut mengalami kegagalan dalam penerapan secara praktikal. Maka kedudukan presiden menjadi begitu penting dan cara pemilihan presiden beserta wakilnya menjadi sangat krusial. Karena nantinya pemilu pilpres akan ikut memengaruhi tingkat efektifitas politik dari presiden yang terpilih (Wahyuningsih, 2013).

Sistem demokrasi negara menjadi suatu hal yang penting, maka tidak heran jika pilpres tahun 2019 diwarnai dengan berbagai dinamika politik yang menghiasi. Hadirnya pasangan calon Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres 2019 menambah bumbu sedap politik pilpres di Indonesia. Pasalnya mereka adalah beberapa tokoh-tokoh terbaik yang dimiliki bangsa ini, KH. Ma'ruf Amin contohnya. Beliau adalah seorang kiai terpandang yang lahir dari ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Sosoknya adalah bagian dari ulama *sepuh* di negeri ini, serta pernah memiliki jabatan esensial yaitu sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta *Rais Aam* PBNU. Hal ini sebagai faktor penting untuk memperoleh simpati masyarakat yang beragama Islam, dimana mereka menjadi sebagian besar partisipan di pemilu pilpres tahun 2019. Pandangan masyarakat kepada KH. Ma'ruf Amin paling tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap perolehan suara, khususnya dikalangan pondok pesantren beserta para santrinya (Sanusi & Gumilar, 2019).

1.6.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2008).

Definisi partisipasi politik memiliki penjelasan dan indikator yang berbeda-beda, tetapi memiliki makna dan maksud yang sama. Menurut Asep Sahid Gatara (2009) dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan”, definisi terkait partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli berikut ini:

Tabel 1.3

Definisi Partisipasi Politik Menurut Beberapa Ahli

Tokoh	Definisi
Miriam Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (<i>public policy</i>). Indikator: • Berupa kegiatan individu atau kelompok • Bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Dan keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak

Tokoh	Definisi
	mempunyai kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Indikator: • Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik • Dilakukan oleh warga negara biasa
Michael Rush & Phillip Althoff	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada macam-macam tingkatan didalam sistem politik. Indikator: • Berupa keterlibatan individu dalam sistem politik • Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi
Herbert Mc Closky	Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (<i>voluntary</i>) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum. Indikator: • Berupa kegiatan-kegiatan sukarela • Dilakukan oleh warga negara • Warga negara terlibat dalam proses-proses politik

Tokoh	Definisi
Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson	Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Indikator: • Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan • Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik • Dilakukan oleh warga negara biasa

Sumber: Gatara, 2009

Berdasarkan definisi partisipasi politik tersebut, terdapat hal-hal substantif yang berkenaan dengan partisipasi. Partisipasi politik di negara-negara demokrasi, umumnya dianggap bahwa semakin banyak partisipasi masyarakat maka akan semakin baik. Semakin tinggi tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik, serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Hal itu menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan sebagai warga negara yang tidak menaruh

perhatiannya terhadap masalah kenegaraan. Pada umumnya, partisipasi yang rendah juga dianggap sebagai legitimasi yang rendah pula (Gatara, 2009).

Partisipasi politik sendiri dapat diklasifikasikan kedalam bentuk-bentuk yang mendorong terjadinya sebuah partisipasi politik. Salah satu tokoh yang menjabarkan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik adalah Gabriel Almond. Penjabaran bentuk partisipasi menurut Gabriel Almond dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi politik konvensional dan non konvensional, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Bentuk Partisipasi Politik Menurut Gabriel Almond

Konvensional	Non Konvensional
1. Pemberian suara	1. Pengajuan petisi
2. Diskusi politik	2. Berdemonstrasi/unjuk rasa
3. Kegiatan kampanye	3. Konfrontasi
4. Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan	4. Mogok
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi	5. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran)
	6. Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

Sumber: Gatara, 2009

Selain Gabriel Almond, tokoh lain yaitu Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator. Artinya orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator. Artinya, mereka yang secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.
4. Pengritik, yakni dalam bentuk partisipasi non konvensional

Melihat penjelasan beberapa tokoh diatas, lebih spesifik penulis akan fokus kepada partisipasi politik dalam bentuk konvensional.

1.6.2.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti (2010), dijelaskan bahwa terdapat dua faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Faktor tersebut adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah. Apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

1.6.3 Teori Perilaku Pemilih

Pelaksanaan pemilihan umum memiliki beberapa komponen/lapisan-lapisan yang ada didalamnya (sama halnya dengan stratifikasi sosial) yaitu orang yang

dipilih (kontestan) dan orang yang memilih (*voters*/pemilih). Sikap politik yang diberikan seseorang (pemilih) terhadap suatu objek politik dinamakan perilaku politik. Deskripsi perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya.

Definisi perilaku politik didapati istilah perilaku yang dilakukan oleh pemilih. Konsep teori yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2010) memiliki pandangan bahwa sikap pemilih adalah sebagai salah satu sikap berpolitik dengan penggambaran ikut sertanya rakyat pada suatu kegiatan pemilihan. Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not vote*) didalam suatu pemilihan umum (secara langsung). Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. Lebih jauh, didalam sikap pemilih memuat rangkaian aktivitas pengambilan putusan atau yang disebut dengan pilihan politik (Surbakti, 2010). Sikap pemilih dan pilihan politik inilah yang kemudian menghasilkan sebuah perilaku pemilih.

Teori perilaku politik adalah sebagai salah satu aspek dari ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideologi dan tingkat partisipasi politik. Secara teoritis, perilaku pemilih dalam sebuah kontestasi politik, dapat diklasifikasikan melalui tiga pendekatan. Klasifikasi pendekatan ini dijabarkan menurut Denis

Kavanagh dalam (Efriza, 2012), yaitu meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional (*rational choice*).

1.6.3.1 Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis berawal dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh beberapa sosiolog, yaitu Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson dan Hazel Gaudet yang berasal dari Columbia University. Karenanya maka pendekatan ini juga kerap disebut dengan mazhab Columbia.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendapatan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologi (seperti agama, etnis/suku, wilayah, jenis kelamin, umur, dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Singkatnya, pengelompokan sosial seperti umur (tua dan muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya.

1.6.3.2 Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dikembangkan melalui Survey Research Centre yang dilakukan mazhab Michigan di Amerika Serikat. Pendekatan ini pertama kali dipelopori oleh Angus Campbell, Gerald Gurin, dan Warren E. Miller. Didalamnya memuat penggunaan dan pengembangan konsep psikologi,

terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku pemilih. Para pemilih menentukan pilihan politiknya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai hasil dari proses sosialisasi. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada beberapa aspek sebagai kajian utama yaitu: identifikasi partai politik/ikatan emosional pada suatu partai politik, dan orientasi identifikasi terhadap calon/kandidat.

1.6.3.3 Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Pendekatan pilihan rasional digagas oleh V.O. Key (Efriza, 2012). Pendekatan ini menjelaskan bahwa kegiatan memilih dijadikan sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Hal yang menjadi pertimbangan para pemilih tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Para pemilih dalam pendekatan pilihan rasional ini memiliki prinsip, motivasi, pengetahuan, dan menggunakan pilihan politiknya dengan pertimbangan yang logis.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada pemikiran maupun *teori*. Definisi dari konsep itu sendiri bisa dikatakan sebagai suatu definisi singkat dari fenomena atau fakta. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.1.1 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan di negara yang menganut sistem demokrasi presidensial. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 pasal 1 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan fasilitas masyarakat yang berdaulat dalam melakukan pemilihan perangkat DPR, DPD, DPRD, dan presiden beserta wakilnya. Lebih jauh didalam undang-undang yang tertuang pada nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menerangkan bahwa pemilu yang dimaksud memiliki tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

1.7.1.2 Santri

Menurut pengertian dan pemahaman masyarakat pada umumnya, istilah santri digunakan untuk menyebutkan nama lain dari siswa atau murid yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren. Istilah santri dimaknai sebagai seseorang yang mendalami ilmu-ilmu agama di pondok pesantren, baik yang tinggal di pondok pesantren maupun yang pulang setelah waktu belajar di pondok pesantren selesai. Menurut Sukanto (1999), penggunaan istilah santri diartikan dan dikonotasikan sebagai seseorang yang mempunyai kiai atau menjadikan kiai sebagai pusat dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, seperti urusan agama. Dalam penelitian ini, penegasan istilah santri lebih merujuk pada artian santri merupakan semua orang yang sedang belajar agama Islam dan menetap di pondok pesantren.

1.7.1.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang mampu memengaruhi pengambilan keputusan melalui proses pemilihan umum secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk-bentuk partisipasi menurut Gabriel Almond dibedakan dalam dua bentuk aksi, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Penelitian ini lebih fokus pada bentuk partisipasi politik secara konvensional yaitu dengan kegiatan antara lain:

- Pemberian suara
- Diskusi politik
- Kegiatan kampanye
- Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan
- Komunikasi individual dengan pejabat politik
- Menjadi panitia dalam kegiatan pemilu

1.7.1.4 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih adalah sikap/perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin dalam sebuah unit/wilayah, dalam hal ini memilih presiden dan wakil presiden. Adapun dalam perilaku memilih, terdapat beberapa pendekatan atau faktor yang memengaruhi didalamnya, yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor pilihan rasional.

1.7.1.4.1 Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis adalah faktor yang menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan, karakteristik latar belakang sosiologis seperti agama, jenis kelamin dan umur serta kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras dan daerah asal.

1.7.1.4.2 Faktor Psikologis

Faktor psikologis adalah faktor yang lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Pendekatan ini mengembangkan konsep psikologi. Faktor psikologis menekankan pada beberapa aspek sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai, dan terhadap kandidat/calon, serta identifikasi terhadap calon/kandidat.

1.7.1.4.3 Faktor Pilihan Rasional

Faktor pilihan rasional atau *rational choice* adalah faktor yang menilai isu-isu politik menjadi pertimbangan penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap visi misi politik yang diajukan oleh calon, dengan mempertimbangkan perhitungan untung rugi dalam menentukan pilihan politiknya dan prestasi yang pernah diraih kandidat sebelumnya.

1.7.2 Definisi Operasional

Berdasarkan pemaparan dari definisi konseptual diatas, penulis kemudian merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1.7.2.1 Partisipasi Pemilih dalam Pilpres 2019

1. Menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2019

2. Alasan pemilih menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2019
3. Alasan pemilih golput/tidak menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2019
4. Partisipasi pemilih dalam mengikuti pendidikan dan diskusi politik seputar Pilpres 2019
5. Partisipasi pemilih menjadi petugas KPPS (TPS) dalam Pilpres 2019

1.7.2.2 Perilaku Pemilih dalam Pilpres 2019

1. Alasan pemilih memilih kandidat Pilpres 2019
2. Mempertimbangkan alasan agama
3. Mempertimbangkan alasan etnis/suku
4. Afiliasi pemilih terhadap parpol tertentu
5. Mempertimbangkan kedekatan terhadap partai politik
6. Mengutamakan figur kandidat Pilpres 2019
7. Mengetahui latar belakang kandidat Pilpres 2019
8. Mengetahui visi-misi dan program kandidat Pilpres 2019
9. Mempertimbangkan kinerja dan pengalaman kandidat Pilpres 2019
10. Mempertimbangkan untung-rugi jika memilih alah satu Pilpres 2019
11. Melakukan diskusi dengan keluarga/teman untuk menentukan pilihannya
12. Harapan pemilih terhadap pasangan calon (paslon) terpilih

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2013). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif sehingga bermaksud mencari penjelasan, membuat prediksi, maupun taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara numerik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Pengolahan data pada penelitian deskriptif didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan (Azwar, 2013).

1.8.2 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah santri di wilayah MWCNU Lasem yang berjumlah 3.017 orang.

Penggunaan istilah santri diartikan dan dikonotasikan sebagai seseorang yang mempunyai kiai atau menjadikan kiai sebagai pusat dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, seperti urusan agama (Sukanto, 1999). Dalam penelitian ini, penegasan istilah santri lebih merujuk pada artian santri merupakan semua orang yang sedang belajar agama Islam dan menetap di pondok pesantren. Kriteria santri dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan santri atau alumni santri pondok pesantren di lingkup wilayah MWCNU Lasem (masih menjadi santri ketika pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019)
2. Merupakan santri yang menetap di pondok pesantren
3. Mempunyai hak pilih
4. Warga negara yang terdaftar sebagai pemilih
5. Sudah berusia 17 tahun pada saat berlangsungnya Pilpres 2019 atau sudah/pernah kawin
6. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap

1.8.3 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Tugas pertama dalam pemilihan sampel adalah menegaskan batasan populasi yang hendak diseledikinya. Dari berbagai rumus yang ada, rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besaran sampel yaitu rumus slovin dengan nilai kritis sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang digunakan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel)

Dari populasi diatas dapat dihitung:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{3.017}{1 + 3.017 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{3.017}{1 + 30,17}$$

$$n = \frac{3.017}{31,17} = 96,79 = 97 \text{ Orang}$$

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 97 santri dari jumlah total 3,017 santri yang ada di wilayah MWCNU Lasem. 97 skala disebar ke 21 pesantren se-Kecamatan Lasem. Sampel mewakili populasi dengan karakteristik penelitian. Penelitian ini menggunakan *Accidental Sampling* atau yang biasa disebut *sampling insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan/insidental, artinya siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009).

1.8.4 Sumber Data

Data yang digunakan untuk dalam kepentingan riset ini yaitu berasal dari data primer dan data sekunder.

1.8.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh dari data secara langsung dengan pemberiannya pada yang mengumpulkan data tersebut (Sugiyono, 2009). Data primer yang diperoleh dalam skripsi ini merupakan hasil pengambilan data melalui angket atau kuesioner yang disebar kepada responden melalui google formulir (*online*).

1.8.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini sebagai asal data dengan perolehannya melalui membaca, belajar, serta pemahaman dari berbagai sumber seperti literatur, buku, jurnal, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan pada riset yang akan dilakukan. Selain itu melalui koran, situs lama resmi suatu instansi, dan lainnya (Sugiyono, 2009)

1.8.5 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada didalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2009). Penulis telah menetapkan secara spesifik variabel penelitian yang kemudian dituangkan dalam daftar pertanyaan angket/kuesioner. Penulis menggunakan dua jenis skala pengukuran yaitu skala Likert dan skala Guttman. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Kemudian Skala Guttman, digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan, seperti jawaban setuju-tidak setuju, benar-salah, pernah-tidak pernah, dan lain-lain (Sugiyono, 2009).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode angket/kuesioner dan dokumentasi.

1.8.6.1 Angket atau Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009). Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Dalam penelitian ini akan menggunakan kuesioner tertutup, yaitu jawaban di dalam pertanyaan sudah ditentukan oleh peneliti/penulis.

1.8.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Teknik dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu berupa catatan, laporan kegiatan, laporan perencanaan, transkrip, notulen rapat, buku dan sejenisnya. Dokumentasi dalam perolehannya melalui kenyataan berupa pesan, diari, gambar, hasil pertemuan, oleh-oleh atau kenangan, jurnal aktivitas serta lainnya. Informasi data berbentuk berkas yang berguna sebagai penggalan info tentang apa yang pernah terjadi sebelumnya.

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh lewat perpustakaan Masjid Jami' Lasem dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Museum Nusantara

Masjid Jami' Lasem. Didukung juga oleh dokumen pendukung lainnya yang berasal dari PCNU Lasem.

1.8.7 Pengolahan Data

1.8.7.1 Editing

Kegiatan memeriksa atau memilih jawaban responden. Hasil jawaban jawaban kuesioner yang telah disebarkan oleh responden, merupakan data yang kemudian diolah menjadi informasi. Proses pengolahan data melalui fase editing yaitu mengumpulkan, memeriksa data, apakah sudah lengkap atau tidak, terjadi kesalahan mengisi, kesalahan mencatat atau kesalahan mencari tanda.

1.8.7.2 Coding

Setelah tahap editing selesai, maka dilakukanlah pemberian kode terhadap jawaban-jawaban dari responden untuk memudahkan dalam menganalisis data. Kegiatan pemberian kode dengan menetapkan skor atau bobot nilai pada hasil jawaban kuesioner, hal ini ditujukan untuk memudahkan proses pengolahan data, dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk (tabulasi data), berupa daftar skor jawaban kuesioner dari setiap variabel yang terdiri dari nomor urut responden, butir item pertanyaan dan total skor item dari setiap responden.

1.8.7.3 Tabulasi

Tabulasi adalah menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk tabel-tabel. Kegiatan menyusun data dalam bentuk tabel guna mendapatkan data yang lebih ringkas. Adapun tahapannya adalah memasukkan data yang diperoleh dan telah dikelompok-kelompokkan dalam tabel induk

kemudian tabel tersebut disajikan dan diuji. Dari hasil perhitungan tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh temuan dan kesimpulan penelitian

1.8.8 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu dengan teknik statistik deskriptif. Keseluruhan data diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20.0 for windows. SPSS adalah program olah data *software* yang sering digunakan untuk mengolah data statistik. Program olah data SPSS ini akan membantu penulis dalam melakukan pengolahan data, sehingga penulis mendapatkan hasil olah data dengan akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan terpercaya.